

Mata Kuliah : Kaidah Perikanan yang Bertanggungjawab (CCRF)  
 Kode/Bobot/Semester : TPI 2.09.1.2/2 SKS (1-1)/I  
 Capaian Pembelajaran : Mampu menerapkan Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF) dalam upaya mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan

No	Kompetensi	Sub Kompetensi / Pokok Bahasan	Tatap Muka ke
1.	Menjelaskan ruang lingkup CCRF	1.1 Menjelaskan kaidah-kaidah Code of Conduct Responsibility Fisheries (CCRF)	1
		1.2 Sejarah, Prinsip, panduan, Tujuan, Arah Kebijakan CCRF, tanggungjawab pihak terkait	2
2.	Mengidentifikasi jenis hewan yang dilindungi dan mendemonstrasikan cara penanganannya agar selamat kehabitatnya	2.1 Jenis – jenis hewan dilindungi (ETP, CITES), proses monitoring Observer, dan cara penanganannya ketika tidak sengaja tertangkap	3
3.	Mengidentifikasi daya dukung SDI dan jenis-jenis alat tangkap yang dilarang, bahaya <i>ghost fishing</i> , <i>discard</i>	3.1 Daya dukung SDI, alat tangkap yang di larang. kerusakan akibat <i>ghost fishing</i> , <i>discard</i> , kerusakan habitat akibat alat tangkap	4
4.	Mengidentifikasi IUU Fishing, penanganannya di Indonesia dan mampu menerapkannya	4.1 IUU Fishing, peran pemerintah dalam memberantas IUU Fishing	5
		4.2 Peraturan terkait, Tindakan apabila menemukan kegiatan IUU Fishing	
5.	Mengidentifikasi kriteria alat tangkap ramah lingkungan dan menghitung tingkat keramahan alat tangkap	5.1 Kriteria alat tangkap ramah lingkungan, cara menghitung tingkat keramahan alat tangkap	6
6.	Menerapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi energi dalam industri penangkapan ikan	6.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi energi dalam industri penangkapan ikan	
7	Menelaah pentingnya selektivitas alat tangkap, faktor yang mempengaruhinya serta	7.1 Pengertian selektivitas alat tangkap, selektivitas jenis, selektivitas ukuran	7

	mampu menghitung selektivitas berbagai alat tangkap	7.2 Perhitungan selektivitas pada alat penangkapan ikan	
Ujian Tengah Semester			8
8.	Menghitung dinamika populasi lingkungan perairan	8.1 Pengertian Hubungan panjang dan berat, <i>Catch Per Unit Effort</i> (CPUE), dan <i>Maksimum Sustainable Yield</i> (MSY)	9
		8.2 Menghitung dan mendiskripsikan hubungan panjang dan berat, <i>Catch Per Unit Effort</i> (CPUE), <i>Maksimum Sustainable Yield</i> (MSY),	10,11
9.	Menjelaskan dan menelaah pentingnya menjaga lingkungan perairan dan sumberdaya perikanan	9.1 Peran ekosistem pesisir dan laut dalam menunjang sumberdaya perikanan	12
		9.2 Bentuk perhatian ekosistem pesisir dan laut (rehabilitasi ekosistem terumbu karang, mangrove, dan lamun)	
10.	Mengidentifikasi tugas-tugas pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, beserta dengan regulasinya	10.1 Peraturan Pemerintah Tentang Ramah Lingkungan : tugas dan fungsi pemerintah bidang kelautan dan perikanan, peraturan pemerintah tentang perikanan ramah lingkungan, Konservasi Perairan, KKLD, Suaka Perikanan, Taman Nasional Perairan	13
11.	Mengidentifikasi rezim pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada	11.1 Pengenalan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan peraturan yang berlaku	14
		11.2 Rezim pengelolaan sumberdaya perikanan dan analisis dalam pengelolaan perikanan	
12.	Menerapkan CCRF dalam kegiatan penangkapan ikan	12.1 Praktek Menerapkan CCRF dalam kegiatan penangkapan ikan	15
Ujian Akhir Semester			16

Daftar Pustaka:

1. FAO.1995. Tata Laksana untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab. Terjemahan. FAO. New York
2. Nikijuluw,V. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
3. Permen KP Nomor 1/permen-kp/2015. Tentang penangkapan lobster (panuliruspp.), kepiting (scyllaspp.), dan rajungan (portunuspelagicusspp.)
4. Permenkp no. 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
5. Permenkp no. 57/Permen-KP/2014.tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayahpengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
6. Permen KP no. per.02/MEN/2011.tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
7. Permen KP no. per.01/MEN/2009. tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks.
9. Undang-Undang Perikanan No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.